

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota merupakan aglomerasi manusia dalam ruang yang relatif terbatas. Aglomerasi penduduk yang dapat mencerminkan kehidupan perkotaan diduga timbul sejak manusia menemukan cara bertani secara menetap. Pertama kali perkotaan tumbuh dan berkembang di daerah pertanian subur, daerah yang memungkinkan untuk berkembangnya pusat perdagangan dan perindustrian (E. Maryani, 2000:8).

Seiring dengan berjalannya waktu, suatu daerah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga membutuhkan pengembangan kota yang sesuai dengan tuntutan perubahan jaman. Dengan adanya pengembangan tersebut, maka dipecahkan suatu daerah ke dalam bentuk kota dan kabupaten. Dengan pembentukan kota dan kabupaten, otomatis pusat pemerintahan dari kabupaten atau kota itu harus terpisah supaya pengaturan daerah dapat lebih terencana dan teratur serta tidak terjadi dualisme pusat pemerintah. Pembentukan suatu pusat kota atau kabupaten merupakan hal yang penting bagi berjalannya suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah terbentuk.

Pada hakikatnya, pembentukan suatu pusat pemerintahan daerah melihat kondisi dan karakteristik wilayahnya itu sendiri. Dengan adanya pengamatan dan penganalisisan tersebut, diharapkan terpilihnya suatu daerah dalam menunjang pemerintahan yang baik dan lancar.

Interaksi dinamis dari berbagai unsur pembentuk kota, seperti masyarakat dan kegiatan sosial ekonominya, lingkungan tempat tinggal, serta potensi-potensi yang terkandung di dalam lingkungan fisiknya, merupakan unsur yang turut menciptakan dinamika pada suatu sistem kota. Dinamika tersebut yang menimbulkan perkembangan dan pertumbuhan suatu kota, pada hakekatnya merupakan suatu manifestasi tuntutan kebutuhan ruang dan interaksi antar kegiatan fungsional untuk kepentingan dan perkembangan masyarakatnya.

Tidak hanya kota besar yang terus mengalami perkembangan, kota-kota kecilpun mempunyai peluang untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kota-kota disepanjang jalur transportasi, kota-kota yang memiliki pertambangan, kota-kota pelabuhan cenderung akan lebih cepat berkembang.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, tanggal 23 Juni 2001 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secara definitif resmi menjadi dua daerah otonom yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Dengan terbentuknya Pemerintahan Kota Tasikmalaya, maka sebagai konsekuensi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus mempersiapkan atau memilih calon lokasi Ibukota Kabupaten yang baru.

Pada tahun 2002 Kabupaten Tasikmalaya menjadi 2 Wilayah Pemerintahan Daerah Otonom, yaitu:

1. Pemerintahan Kota Tasikmalaya, meliputi 8 Kecamatan.
2. Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, meliputi 39 Kecamatan.
Kecamatan Singaparna pun termasuk ke Wilayah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Fungsi Ibukota kabupaten selain sebagai pusat administrasi pemerintahan, juga sebagai pusat pendorong pertumbuhan kota-kota, dan desa-desa lainnya yang ada di dalam wilayah administratif kabupaten tersebut. Ibukota kabupaten ini juga harus memiliki kekuatan ekonomi yang dapat melanggengkan kehidupan kota tersebut sebagai kota yang mandiri.

Jadi, peranan utama dari Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang baru akan merupakan suatu pusat yang secara aktif dan fungsional dapat mendukung kegiatan-kegiatan wilayah kabupaten tidak hanya terbatas pada bidang administrasi pemerintahan saja tetapi juga pada bidang ekonomi, prasarana, fasilitas pelayanan dan kebutuhan fisik lainnya serta memainkan peran strategis sebagai pusat pertumbuhan untuk mendorong perkembangan dan kesejahteraan di kecamatan-kecamatan sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan peraturan tersebut, maka pemindahan ibukota pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus segera dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan oleh kebutuhan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya supaya berjalan baik dan lancar.

Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2004 dijelaskan tentang pemindahan ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang sesuai dengan pasal 1, dengan bunyi:

- (1) Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dipindahkan tempat kedudukannya dari Kota Tasikmalaya ke Singaparna di wilayah Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

- (2) Ibukota Kabupaten Tasikmalaya merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Singaparna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Desa Sukamulya;
 - b. Desa Sukaasih

Berdasarkan hal tersebut Kecamatan Singaparna telah mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu:

1. Singaparna sebagai Ibukota Kecamatan.
2. Singaparna sebagai pusat kantor pembantu Bupati Wilayah Singaparna, meliputi: Kecamatan Singaparna, Kecamatan Cigalontang dan Kecamatan Leuwisari sampai tahun 2001.
3. Selanjutnya di tahun yang sama (2001) Kecamatan Singaparna yang terdiri dari 22 Desa dipecah menjadi 3 Wilayah Kecamatan yaitu:
 - Kecamatan Singaparna, meliputi 10 Desa.
 - Kecamatan Sukarame, meliputi 6 Desa.
 - Kecamatan Mangunreja, meliputi 6 Desa.
4. Singaparna sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya sejak 5 Oktober 2004.

Suatu daerah yang akan dijadikan sebuah ibukota, baik itu ibukota negara ataupun kabupaten terlebih dahulu harus diketahui potensi apa saja yang mendukung. Baik dari potensi fisik yang meliputi unsur letak, iklim, morfologi, geologi, tanah maupun potensi sosial yang meliputi sumberdaya manusia yang

ada serta fasilitas-fasilitas sosial yang tersedia yang mendukung dalam pembangunan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Singaparna.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti Kecamatan Singaparna, terutama yang berkenaan dengan potensi geografis yang mendukung Kecamatan Singaparna sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini penting dilakukan agar pemerintah setempat dapat memanfaatkan secara optimal kondisi geografis yang telah tersedia sesuai dengan potensinya, sehingga semua komponen dapat diberdayakan secara maksimal dengan tidak mengesampingkan kemampuan dan kesulitan masyarakat yang sedang dihadapi.

B. Masalah dan Rumusannya

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat suatu masalah penelitian sebagai berikut: “Potensi geografis apakah yang mendukung Kecamatan Singaparna terpilih menjadi Ibukota Kabupaten Tasikmalaya?”

Berdasarkan pertanyaan utama di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor fisik apakah yang mendukung Kecamatan Singaparna terpilih sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya?
2. Faktor sosial apakah yang mendukung Kecamatan Singaparna terpilih sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya?

C. Definisi Operasional

Penelitian ini penulis beri judul "*Potensi Geografis Kecamatan Singaparna Sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya*" agar tidak terjadi salah pengertian dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan arti yang dimaksud dalam penelitian ini, yakni :

1. Potensi Geografis adalah suatu daya, tenaga yang diharapkan atau kekuatan yang ada pada suatu objek Potensi Geografis yang mendukung Kecamatan Singaparna adalah berbagai potensi yang ada di wilayah tersebut yang bisa dikembangkan, dalam hal ini bisa potensi fisik maupun potensi sosial.
2. Potensi fisik adalah kekuatan fisik yang mendukung Kecamatan Singaparna sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya. Yang menjadi bahan kajiannya adalah letak, iklim dan cuaca, kondisi morfologi, geologi, tanah, hidrologi, dan penggunaan lahan.
3. Potensi sosial yaitu keadaan sosial yang mendukung Kecamatan Singaparna sebagai Ibukota Kabupaten, yang menjadi variabelnya adalah jumlah dan kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan, komposisi penduduk serta tingkat pendidikan.
4. Fasilitas sosial ekonomi adalah sarana umum yang dapat digunakan masyarakat luas dalam rangka memenuhi keperluan hidup masyarakat. Fasilitas yang dikaji adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas transportasi dan fasilitas perdagangan. Ketiga potensi tersebut bisa mendukung perkembangan Kecamatan Singaparna. Selain itu juga berkembangnya wilayah tersebut didukung oleh potensi sumber daya manusia

yang berkualitas, berpendidikan sehingga bisa mendukung perkembangan Kecamatan Singaparna.

Jadi berdasarkan definisi oprasional tersebut, yang dimaksud dengan judul penelitian dalam skripsi ini adalah *menggambarkan tentang potensi atau daya dukung komponen-komponen geografis Kecamatan Singaparna sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.*

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor fisik apa saja yang mendukung perkembangan Kecamatan Singaparna terpilih menjadi Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengidentifikasi faktor sosial apa saja yang mendukung perkembangan Kecamatan Singaparna terpilih menjadi Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

1. Diperolehnya data tentang faktor fisik yang mendukung Kota Singaparna sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.
2. Diperolehnya data tentang faktor sosial yang mendukung Kota Singaparna sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.

3. Memberikan informasi kepada Pemerintah setempat sebagai bahan masukan partisipasi terhadap perkembangan kota di masa yang akan datang.
4. Bagi dunia pendidikan diharapkan dapat memperkaya wawasan kegeografian terutama sebagai bahan pengajaran geografi pokok bahasan Desa dan Kota sub pokok bahasan Interaksi Kota.

